

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Terdapat dua pengertian dari koperasi yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha atau badan hukum yang memiliki anggota orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Sementara itu, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2.1.2 Landasan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, terdapat tiga landasan Koperasi Indonesia yaitu landasan mental, landasan idiil, dan landasan struktural dan gerak. Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran

diri sendiri. Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural dan gerak Koperasi Indonesia adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disertai penjelasan di dalamnya.

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4, terdapat empat fungsi dan peran koperasi. Empat fungsi dan peran tersebut diantaranya:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5, terdapat tujuh prinsip koperasi. Tujuh prinsip tersebut diantaranya:

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerja sama antar koperasi.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart, Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan suatu informasi dengan tujuan untuk pengambilan suatu keputusan.(2018, 10)

Sedangkan, menurut Mulyadi, Sistem Akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.(2016, 3)

Sementara itu, menurut Turner, Weickgenannt, dan Copeland, Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang meliputi proses, prosedur, dan suatu sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.(2017, 4)

2.2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2018, 11), terdapat enam komponen dalam Sistem Informasi Akuntansi. Enam komponen tersebut diantaranya:

- a. Orang-orang yang menggunakan sistem;
- b. Prosedur dan Instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data;
- c. Data tentang organisasi dan kegiatan usahanya;
- d. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data;
- e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan di Sistem Informasi Akuntansi;
- f. Pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data Sistem Informasi Akuntansi.

2.2.3 Ancaman Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018, 127), terdapat empat jenis ancaman Sistem Informasi Akuntansi yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Empat jenis ancaman tersebut diantaranya:

1. Bencana alam dan politik;
2. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi perangkat lunak;
3. Tindakan yang tidak disengaja;
4. Tindakan disengaja (*computer crimes*).

2.3 Siklus Pendapatan pada Sistem Informasi Akuntansi

2.3.1 Pengertian Siklus Pendapatan

Menurut Romney dan Steinbart, Siklus Pendapatan adalah suatu kegiatan atau serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa layanan kepada pelanggan dan mendapatkan uang sebagai pembayaran atas penjualan barang tersebut.(2018, 354)

Menurut Rama dan Jones, Siklus Pendapatan merupakan suatu kegiatan atau serangkaian aktivitas yang terjadi di dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan tersebut melakukan operasinya dari menerima/merespon pesanan pelanggan hingga memperoleh pembayaran dari pelanggan dan menyusun laporan. Kegiatan yang terjadi di dalam suatu siklus pendapatan seperti, penerimaan pesanan, pembuatan dokumen pesanan, menyiapkan barang, penagihan pelunasan, dan penerimaan pelunasan. Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi dalam Siklus Pendapatan yakni untuk menyokong kinerja operasi bisnis perusahaan dengan memproses data transaksi secara efisien.(2009, 23)

2.3.2 Prosedur Penjualan dalam Siklus Pendapatan

Menurut Hall, prosedur penjualan merupakan suatu kegiatan menerima dan memproses pesanan dari pelanggan, mengisi pesanan, dan mengirimkan produk ke pelanggan, menagih pelanggan dengan waktu yang tepat, dan menghitung transaksi dengan benar.(2011, 154)

Prosedur-prosedur di dalam aktivitas penjualan diantaranya:

- a. *Receive Order*
- b. *Check Credit*

- c. *Pick Goods*
- d. *Ship Goods*
- e. *Update Inventory Records*
- f. *Bill Customer*
- g. *Update Accounts Receivable*
- h. *Post to General Ledger*

2.3.3 Dokumen yang terkait dalam Siklus Pendapatan

Menurut Mulyadi (2018, 386), terdapat tujuh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam suatu siklus pendapatan. Tujuh dokumen tersebut diantaranya:

- a. Faktur Penjualan Tunai

Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai macam informasi yang diperlukan oleh seorang manajemen yang berkaitan dengan transaksi penjualan tunai.

- b. Pita Register Kas (*cash register tape*)

Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas (*cash register*). Pita register kas ini merupakan suatu bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung bagi faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan.

- c. *Credit Card Sales Slip*

Dokumen ini dicetak oleh *credit card center* bank yang menerbitkan kartu kredit dan diberikan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit.

d. *Bill of Lading*

Dokumen ini merupakan suatu bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan *COD* yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum.

e. Faktur Penjualan *COD*

Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan *COD*.

f. Bukti Setor Bank

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat menjadi tiga lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, seiring dengan penyetoran kas dari hasil penjualan tunai ke bank.

g. Rekapitulasi Beban Pokok Penjualan

Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode (misalnya tiga bulan).

2.4 Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dijalankan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. (2018, 226)

Pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai sebuah proses karena ia menyebar ke semua aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal juga memberikan jaminan memadai-jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu,

sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Berdasarkan pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi, tujuan-tujuan pengendalian yang akan dicapai, diantaranya:

- a. Memberikan pengamanan untuk aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah.
- b. Mengelola catatan dengan detail yang baik dengan tujuan untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
- c. Memberikan informasi yang reliable dan akurat.
- d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- e. Meningkatkan efisiensi operasional.
- f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
- g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.5 Pengendalian Internal dalam Siklus Pendapatan

2.5.1 Klasifikasi Ancaman dan Pengendalian dalam Siklus Pendapatan

Menurut Romney dan Steinbart (2018), terdapat empat klasifikasi ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Empat klasifikasi tersebut diantaranya:

1. Ancaman dan pengendalian pada tahap entri pesanan penjualan.
2. Ancaman dan pengendalian pada tahap pengiriman.
3. Ancaman dan pengendalian pada tahap penagihan.
4. Ancaman dan pengendalian pada tahap penerimaan kas.

2.5.2 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Entri Pesanan Penjualan

Tabel II.1 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Entri Pesanan Penjualan

Ancaman	Pengendalian
Pesanan tidak valid	- Tanda tangan tertulis atau digital
Tidak akuratnya pesanan	- Pengontrolan data entri - Pembatasan akses ke data induk
Kehilangan pelanggan	- <i>Self-help websites</i> dan evaluasi kinerja terkait peringkat layanan yang diberikan oleh pelanggan
Kekurangan/kelebihan persediaan	- Perhitungan persediaan secara periodik - Sistem pengendalian persediaan perpetual - Perkiraan penjualan dan laporan kegiatan - Pelatihan - Penggunaan <i>bar codes</i> atau RFID
Piutang tak tertagih	- Pembatasan kredit - Klasifikasi umur akun piutang - Otorisasi khusus terkait penjualan ke pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit pelanggan

Sumber : Romney dan Steinbart (2018)

2.5.3 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Pengiriman

Tabel II.2 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Pengiriman

Ancaman	Pengendalian
Pencurian persediaan	- Pembatasan akses fisik ke persediaan - Perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi ke pencatatan kuantitas - Pencatatan seluruh perpindahan persediaan
Salah pengambilan barang	- <i>Bar Code</i> - Teknologi RFID - Rekonsiliasi antara <i>picking list</i> dengan <i>sales order</i>
Kesalahan dalam proses pengiriman	- Menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi keterlambatan - Pengendalian edit entri data - Konfigurasi sistem ERP

Sumber : Romney dan Steinbart (2018)

2.5.4 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Penagihan

Tabel II.3 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Penagihan

Ancaman	Pengendalian
Kesalahan penagihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan akses ke data induk - Pengendalian edit data entri - Rekonsiliasi antara dokumen pengiriman dengan <i>sales order</i>
Kesalahan posting pada akun piutang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian data entri - Rekonsiliasi total <i>batch</i> - Rekonsiliasi akun subsidiari ke buku besar
Tidak akurat atau tidak valid memo kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan tugas terkait otorisasi kredit memo dari entri pesanan penjualan dan pemeliharaan akun pelanggan - Konfigurasi sistem untuk mengemblok memo kredit
Gagal penagihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan fungsi pengiriman dengan penagihan - Rekonsiliasi secara periodik terkait faktur dengan <i>sales order</i>, <i>picking ticket</i>, dan dokumen pengiriman

Sumber : Romney dan Steinbart (2018)

2.5.5 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Penerimaan Kas

Tabel II.4 Ancaman dan Pengendalian pada tahap Penerimaan Kas

Ancaman	Pengendalian
Permasalahan arus kas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan EFT, peti uang, atau kartu kredit - Anggaran arus kas - <i>Discount</i> atas pembayaran segera dari pelanggan
Pencurian kas	<ul style="list-style-type: none"> - Setoran harian dari seluruh penerimaan kas - Penggunaan mesin kasir - Terdapat dua orang yang bertugas untuk membuka semua surat yang terdapat kemungkinan pembayaran dari pelanggan - Penggunaan EFT, FEDI, dan peti uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai

Sumber : Romney dan Steinbart (2018)